



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(LKj-IP SKPD)**

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	1
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 5
2.1 Perencanaan Strategik.....	5
2.2 Perjanjian Kinerja.....	11
 BAB II AKUNTABILITAS KINERJA.....	 12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2 Realisasi Anggaran.....	29
 BAB III PENUTUP.....	 33
 Lampiran :	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Kewajiban penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2019. Melalui Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2019, Dinas Pendidikan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Tahun 2019 (RKT), dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan atas kinerja Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2019. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas keterlibatan serta dukungannya dalam memberikan karyanya untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka mewujudkan masyarakat Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Tangguh dan Sejahtera (TUNTAS).

Jambi, Februari 2020 M.
Rajab 1441 H.

Plt. KEPALA DINAS,

DTO

MUHAMMAD SYAHRAN, SE
Penata Tk. I
NIP. 19711109 200501 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Kedudukan

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan unsur Pemerintah Provinsi Jambi yang diberi tanggungjawab di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan rganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

1.1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3 Permasalahan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan diatas, maka Dinas Pendidikan tentunya memiliki mandat untuk menghadapi tantangan penting yang harus dihadapi dalam kurun waktu tahun 20016-2021 sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh kabupaten dan kota.

3. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah.
4. Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, dan kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
5. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan.
6. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

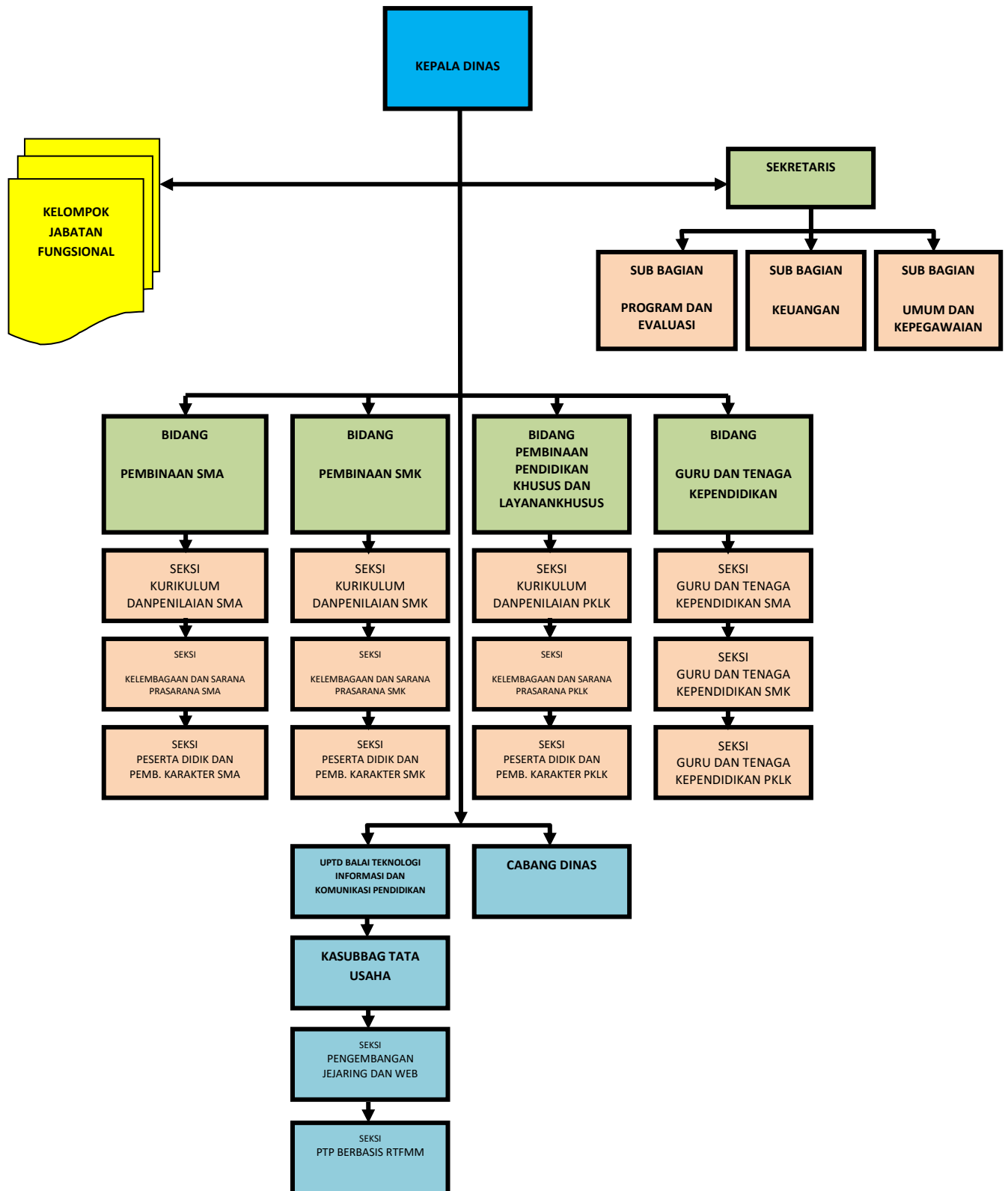
Adapun permasalahan utama Dinas pendidikan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan di Provinsi Jambi, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah
2. Belum meratanya ketersediaan lembaga pendidikan antar kabupaten dan kota
3. Banyak kondisi infrastruktur sekolah yang rusak
4. Belum optimalnya proses belajar mengajar akibat keterbatasan sarana prasarana
5. Distribusi dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidik yang belum merata
6. Sistem informasi manajemen yang berbasis TIK pada satuan pendidikan belum berjalan
7. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang masih umum
8. Masih rendahnya lulusan sekolah menengah yang diserap sebagai tenaga kerja pada dunia usaha dan industri

1.1.4 Stuktur Organisasi

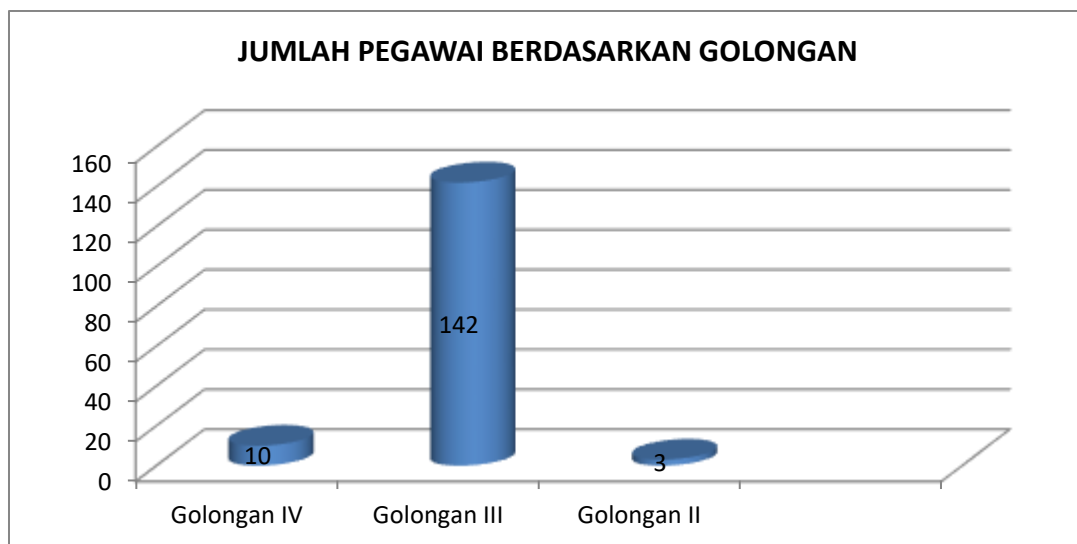
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI**
(Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016)



Struktur organisasi diatas dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang tercatat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2017/2018 sebanyak 155 orang yang diurai pada diagram berikut :

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan Tahun 2019.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi

Visi Pemerintah Provinsi Jambi adalah “Tertib,Unggul, Tangguh, Adil, dan Sejahtera” (Jambi TUNTAS 2021).

Misi adalah sesuatu tugas yang diemban dan ingin diwujudkan oleh instansi sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal eksistensi serta peranan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan.Untuk mewujudkan visi sebagaimana telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan misi, yaitu Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya agama dan berkesetaraan gender danMisi 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.

Hal tersebut tentunya tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, melainkan dibutuhkan kerjasama dan sinergitas yang baik dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jambi serta stakeholders pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, misi yang ditetapkan tersebut mengisyaratkan pentingnya keterlibatan/partisipasi dari berbagai pihak.

Untuk memberikan kebersamaan langkah dalam mencapai tujuan perlu kiranya dirumuskan nilai-nilai instansi yang akan dianut bersama. Nilai-nilai ini harus mampu menggambarkan tata nilai dan falsafah yang dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugas yang nantinya akan terkait erat dengan kegiatan pelayanan yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kepada stakeholder/masyarakat.

Pemilihan nilai-nilai tersebut bukan berarti mengesampingkan nilai-nilai luhur lainnya. Berikut nilai-nilai luhur Dinas Pendidikan Provinsi Jambi :

1) Profesionalisme

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, pegawai harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

Kapabilitas merupakan hal yang sangat krusial bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengingat perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat tersebut mustahil akan dapat direspons dengan baik apabila tidak ditunjang dengan adanya kapabilitas dari para pelaksana kegiatan/program/kebijakan organisasi, dan kapabilitas pegawai tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan harus melalui suatu proses yang terencana dan berkesinambungan serta didukung dengan penyediaan sarana penunjang yang baik, tepat dan memadai.

Dengan kapabilitas yang tinggi, pegawai akan terpicu untuk bekerja dengan berorientasi pada hasil. Di samping itu, kapabilitas yang tinggi tersebut akan dapat mendorong terhadap peningkatan integritas moral/etika untuk berinteraksi dengan rekan sejawat, bawahan, atasan, maupun dengan pihak-pihak luar organisasi.

2) Keseimbangan

Keseimbangan merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk meyakinkan adanya keharmonisan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap elemen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja secara terkotak-kotak. Selain itu, organisasi tidak bisa hanya menuntut kewajiban dari para anggota organisasinya tanpa memikirkan hak mereka.

3) Kemitraan

Di dalam era demokrasi yang sedang berkembang saat ini, pola-pola kerja kemitraan perlu dikembangkan dan diupayakan menghindari diri dari pola-pola lama yang menggunakan pendekatan kewenangan (*power approach*) ke pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan stakeholder (*stakeholder oriented approach*), sehingga terjalin hubungan yang harmonis/positif dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, Jajaran Kementrian Agama dan stakeholders pendidikan lainnya.

2.1.2 Keterkaitan NAWACITA, Misi Kemendikbud, Misi Pemerintah Provinsi serta Janji Politik Gubernur.

Tabel 2.1 Keterkaitan NAWACITA, Misi Kemendikbud, Misi Pemerintah Provinsi Jambi serta Politik Gubernur

NAWA CITA	MISI KEMENDIKBUD	MISI PROVINSI JAMBI	JANJI POLITIK GUBERNUR
Nawa Cita 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Nawa Cita 6. Meningkatkan Produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional Nawa Cita 8. Melakukan revolusi karakter bangsa Nawa Cita 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Misi 1 : Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat Misi 2 : Mewujudkan akses yang meluas dan merata Misi 3. Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu Misi 4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Misi 5 : Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publik	Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya agama dan berkesetaraan gender	1. Pemberian tambahan penghasilan non Guru sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah 3. Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis 4. Kuliah gratis untuk 15.000 orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/ swasta

Dalam upaya sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan antara pemerintah, kementerian, pemerintah provinsi, dan janji politik gubernur terpilih, dalam penyusunan restra ini disandingkanlah program-program tersebut sehingga terdapat benang merah masing-masing program. Melalui upaya ini diharapkan semua program kegiatan yang disusun dapat bermanfaat dan berhasil guna bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Jambi, dan pada akhirnya akan bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Jambi

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan adalah untuk mendukung pencapaian misi kedua pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APM SMA	44,63%	45,56%	46,53%	48,54%	50,68%	52,98%
			APK SMA	53,19%	53,30%	55,46%	57,85%	60,41%	63,15%
			APM SMK	25,17%	26,20%	27,18%	27,13%	27,20%	27,98%
			APK SMK	30,01%	30,98%	31,95%	31,74%	31,42%	30,98%
			Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah	NA	NA	20%	22%	24%	26%
			Angka melanjutkan ke PT. Akreditasi 'B' (SMA)	42,30%	45,47%	48,88%	52,55%	56,49%	60,73%
			Angka melanjutkan ke PT. Akreditasi 'B' (SMK)	42,30%	45,47%	48,88%	52,55%	56,49%	60,73%
			Tingkat Kelulusan SMA	99%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%
			Tingkat Kelulusan SMK	99%	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%	99,5%
			Persentase tamatan SMK yang bekerja	35%	40%	45%	50%	55%	60%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase Guru yang Bersertifikasi	37,49%	40,30%	43,32%	46,57%	50,06%	53,81%

2.1.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan sebelumnya serta memperhatikan kekuatan/ kelemahan yang dimiliki dan peluang-peluang/ ancaman yang ada, selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan pendidikan dalam periode lima tahun mendatang. Strategi merupakan cara mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntut pencapaian tujuan dan visi organisasi pada akhirnya.

1. Strategi

Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan Pendidikan Menengah

2. Kebijakan

- a. Meningkatkan persentase guru bersertifikat
- b. Meningkatkan persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi berakreditasi baik melalui peningkatan SPM bidang pendidikan

3. Program dan Kegiatan Indikatif

- a. Program Pendidikan SMA dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
 - APM SMA
 - APK SMA
 - Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"
 - Tingkat Kelulusan SMA
- b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
 - Persentase Guru yang bersertifikasi

- c. Program Pendidikan SMK dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
- APM SMK
 - APK SMK
 - Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"
 - Tingkat Kelulusan SMK
 - Persentase tamatan SMK yang bekerja
- d. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
- Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah

Dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pendidikan			
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan menengah.	a) Meningkatkan persentase guru bersertifikat	Program Pendidikan SMA	<ul style="list-style-type: none"> • APM SMA • APK SMA • Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" • Tingkat Kelulusan SMA
	b) Meningkatkan persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi berakreditasi baik melalui peningkatan SPM bidang pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase guru yang bersertifikasi
		Program Pendidikan SMK	<ul style="list-style-type: none"> • APM SMK • APK SMK • Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" • Tingkat Kelulusan SMK • Persentase tamatan SMK yang bekerja
		Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi membuat Perjanjian Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK	(SMA) 57,85%
			(SMK) 31,74%
		APM	(SMA) 48,54%
			(SMK) 27,13%
		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah	22%
		Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	52,55%
		Tingkat Kelulusan SMA/SMK	99,3%
		Persentase Tamatan SMK yang Bekerja	50%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 (B)
		Nilai AKIP	62 (B)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2019 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2019 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2019 dengan realisasinya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2019 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun masih terdapat Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2019 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing Indikator Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK SMA	57,85%	41,98%	72,56%
		APM SMA	48,54%	35,57%	73,27%
		APK SMK	31,74%	28,92%	91,11%
		APM SMK	27,13%	23,21%	85,55%
		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah	22%	5,40%	24,54
		Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	52,55%	35%	57,54
		Tingkat Kelulusan SMA/SMK	99,3%	98,92%	99,62
		Persentase Tamatan SMK yang Bekerja	50%	34,37%	68,74
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	77,65	95,86
		Nilai AKIP	62	65	104,83

Berdasarkan tabel 3.2 pada sasaran strategis pertama jika di lihat perbandingan target dan realisasi pada tahun 2019, target indikator APK SMA sebesar 63,15%, baru tercapai sebesar 41,98% dengan capaian 72,56% dengan kategori sedang sedangkan APK SMK

dengan target 30,98% telah mencapai 28,92% dengan capaian 91,11% dengan kategori sangat baik. Pada indikator APM SMA mempunyai target 52,98% baru tercapai 35,57% dengan capaian 73,27% dengan kategori sedang sedangkan APM SMK dengan target 27,98% telah mencapai 23,21% dengan capaian 85,55% dengan kategori tinggi.

Pada Indikator Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah pada tahun 2019, capaian kinerja baru mencapai 24,54% dengan kategori sangat rendah, begitu juga indikator Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" baru mencapai 57,54% dengan kategori rendah. Selanjutnya indikator Tingkat Kelulusan SMA/SMK pada tahun 2019 telah mendekati target dengan capaian kinerja sebesar 99,62% dengan kategori sangat baik namun tidak sama pada indikator Persentase Tamatan SMK yang Bekerja dengan capaian kinerja sebesar 68,74% dengan kategori sedang.

Berbeda dengan sasaran strategis pertama, sasaran strategis kedua mempunyai realisasi yang telah mendekati dan mencapai target yaitu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mempunyai capaian realisasi sebesar 95,86% dengan kategori sangat baik dan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 104,83% dengan kategori sangat baik.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pada tahun 2019 tentunya harus dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Adapun perbandingan antara capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat kita lihat dari tabel berikut :

Tabel. 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	APK SMA	55,46%	57,85%	41,34%	41,98%
	APM SMA	46,53%	48,54%	30,29%	35,57%
	APK SMK	31,95%	31,74%	27,58%	28,92%
	APM SMK	27,18%	27,13%	21,14%	23,21%
	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah	20%	22%	5,33%	5,40%
	Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	48,88%	52,55%	34,31%	35%
	Tingkat Kelulusan SMA/SMK	99,20%	99,3%	98,85	98,92%
	Persentase Tamatan SMK yang Bekerja	45%	50%	33,21	34,37%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	81	-	77,65
	Nilai AKIP	-	62	-	65

Berasarkan tabel 3.3 diatas, perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 terjadi peningkatan pada indikator APK dan APM jenjang pendidikan SMA dan SMK yaitu indikator APK SMA pada tahun 2018 sebesar 41,34% meningkat menjadi 41,98% pada tahun 2019, begitu juga indikator APK SMK dari 27,58% pada tahun 2018 menjadi 28,92% pada tahun 2019. Peningkatan ini dialami juga pada indikator APM SMA sebesar 30,29% pada tahun 2018 menjadi 35,57% pada tahun 2019 dan juga pada APM SMK sebesar 21,14% pada tahun 2018 menjadi 23,21% pada tahun 2019.

Pada Indikator Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 5,33% meningkat pada tahun 2019 sebesar 5,40% begitu juga pada indikator Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" yaitu sebesar 34,31% pada tahun 2018 meningkat menjadi 35% pada tahun 2019, selanjutnya indikator Tingkat Kelulusan SMA/SMK mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu 98,85% pada tahun 2018 meningkat 98,92% pada tahun 2019, begitu juga Persentase Tamatan SMK yang Bekerja mengalami peningkatan dari 33,21% pada tahun 2018 meningkat 34,37% pada tahun 2019.

Berbeda dengan sasaran strategis pertama, sasaran strategis kedua mempunyai realisasi yang telah mendekati dan mencapai target yaitu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mempunyai capaian realisasi sebesar 95,86% dengan kategori sangat berhasil dan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 104,83% dengan kategori sangat baik.

3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan akhir periode Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Periode 2016-2021

Target dan realisasi Indikator IKU tahun 2019 telah tertuang pada dokumen Review Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dimana target dan realisasi dan proyeksi realisasi dijabarkan per tahun sehingga dapat kita nilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing indikator yang kemudian akan dilakukan perencanaan untuk tahun berikutnya. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2016-2021 dapat kita lihat dari tabel berikut :

Tabel. 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan akhir Periode Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Periode 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2019	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK SMA	63,15%	41,98%	66,47%
		APM SMA	52,98%	35,57%	67,13%
		APK SMK	30,98%	28,92%	93,35%
		APM SMK	27,98%	23,21%	82,95%
		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah	26%	5,40%	20,76
		Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	60,73%	35%	57,63
		Tingkat Kelulusan SMA/SMK	99,50%	98,92%	99,41
		Persentase Tamatan SMK yang Bekerja	60%	34,37%	57,28
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	77,65	94,69
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73	65	89,04

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, perbandingan capaian kinerja dengan akhir periode renstra adalah tidak semua indikator telah mendekati capaian akhir tahun renstra. Hal tersebut dilihat pada indikator APK dan APM jenjang pendidikan SMA dan SMK yaitu indikator APK SMA pada tahun 2019 baru mencapai 66,47% namun sebaliknya pada indikator APK SMK telah mendekati target akhir priode renstra sebesar 93,35%. Pada Indikator APM SMA dan SMK mengalami hal yang sama yaitu indikator APK SMA pada tahun 2019

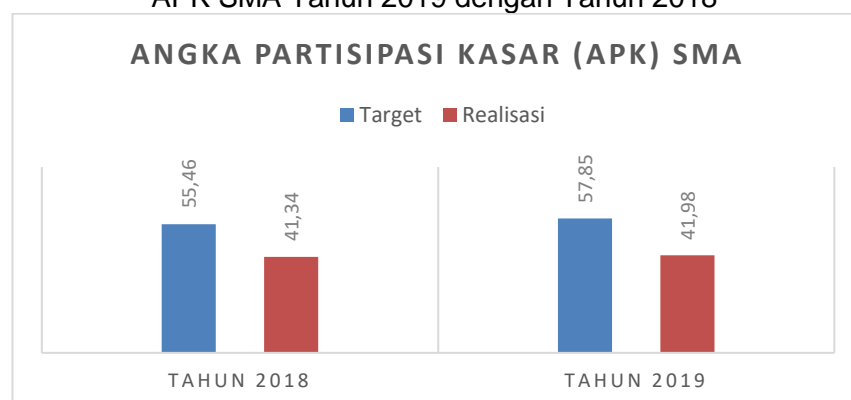
baru mencapai 67,13% sedangkan indikator APM SMK pada tahun 2019 sebesar 82,95%.

Pada indikator Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah, Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B", dan Persentase Tamatan SMK yang Bekerja, capaian yang dimiliki masih belum mendekati target akhir tahun renstra yaitu sebesar 20,76% untuk indikator Pada indikator Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah, 57,63% untuk Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" dan 57,28% untuk Persentase Tamatan SMK yang Bekerja namun tidak pada indikator Tingkat Kelulusan SMA/SMK yang telah mendekati target akhir renstra sebesar 99,41%.

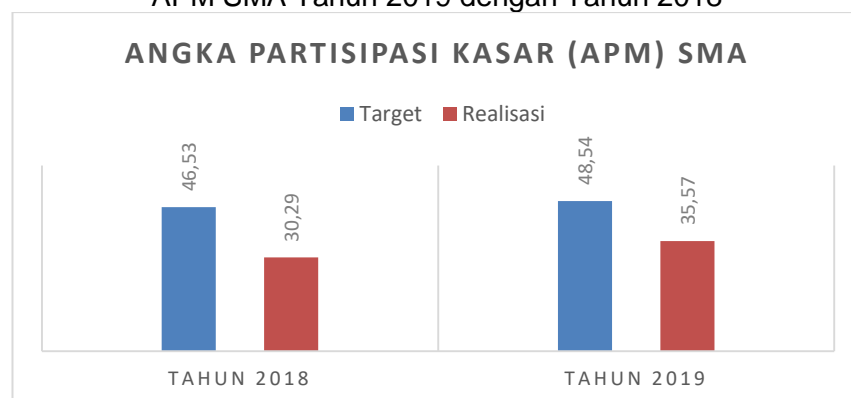
Pada sasaran strategis kedua mempunyai realisasi yang telah mendekati dan mencapai target akhir renstra yaitu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai capaian realisasi sebesar 94,69% dan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 89,04%.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
a. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMA dan SMK

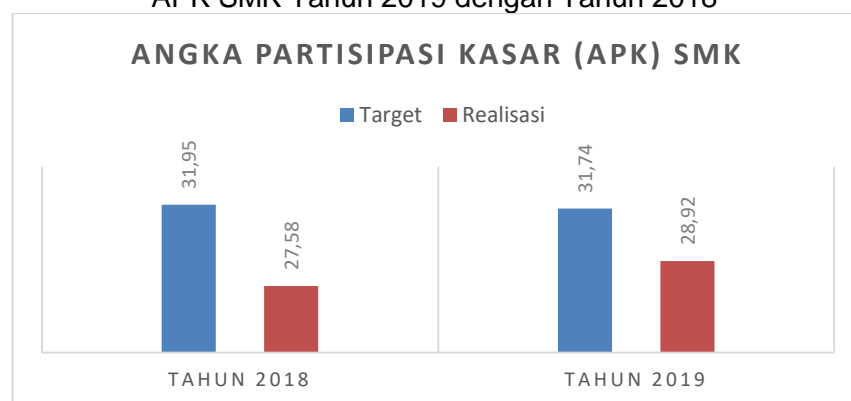
Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator APK SMA Tahun 2019 dengan Tahun 2018



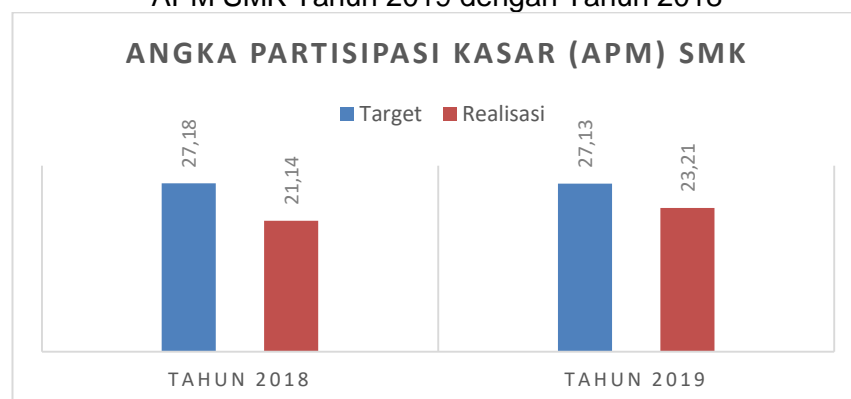
Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator
APM SMA Tahun 2019 dengan Tahun 2018



Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator
APK SMK Tahun 2019 dengan Tahun 2018



Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator
APM SMK Tahun 2019 dengan Tahun 2018



Jika dilihat dari grafik 3.1-3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dan 2018, realisasi indikator APK dan APM SMA mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun jika dilihat pada tabel 3.2 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2019, pada indikator APK dan APM SMA dan SMK yang realisasinya belum sepenuhnya mendekati target yaitu APK dan APM SMA sehingga dapat kita pahami bahwa usaha Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam pemerataan akses pendidikan yang telah dijelaskan diatas tentunya mempunyai hambatan dalam pencapaian target APK dan APM yang perlu mendapat solusi untuk mengatasinya.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator APK dan APM pada jenjang pendidikan SMA dan SMK, antara lain :

1. Masih ada budaya pada masyarakat yang menjadi hambatan untuk mendukung meningkatnya APK yaitu anak putus sekolah yang disebabkan menikah di usia dini seperti menikah pada saat di bangku SMP.
2. Masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh anak yang masih berusia sekolah yang harus bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga.
3. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah di luar daerah.

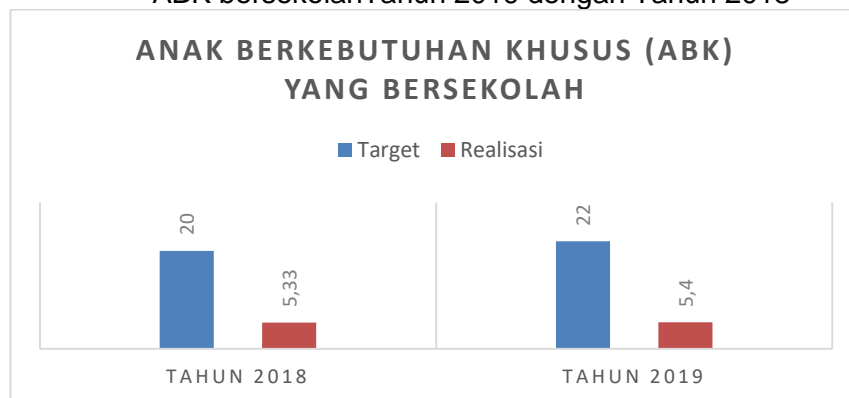
Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

1. Meningkatkan Pemberian beasiswa bagi siswa prestasi diantaranya pada jenjang pendidikan menengah yaitu SMAN/SMKN dan SLB, sehingga diharapkan dapat membantu dan memotivasi siswa untuk terus berprestasi hingga tamat sekolah.
2. Mendekatkan layanan pendidikan (pendirian unit sekolah baru) kepada masyarakat pada wilayah geografis yang sulit

dijangkau untuk menekan pembiayaan personal yang harus dikeluarkan oleh peserta didik.

b. Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah

Grafik 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator ABK bersekolah Tahun 2019 dengan Tahun 2018



Jika dilihat dari tabel 3.2 Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2019, pada indikator Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah yang realisasinya masih jauh dari target, namun bila dilihat dari grafik 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator ABK bersekolah Tahun 2019 dengan tahun 2018 terjadi peningkatan relaisasi dari tahun sebelumnya, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk melakukan inovasi dan kebijakan yang akan mendorong masyarakat yang mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah.

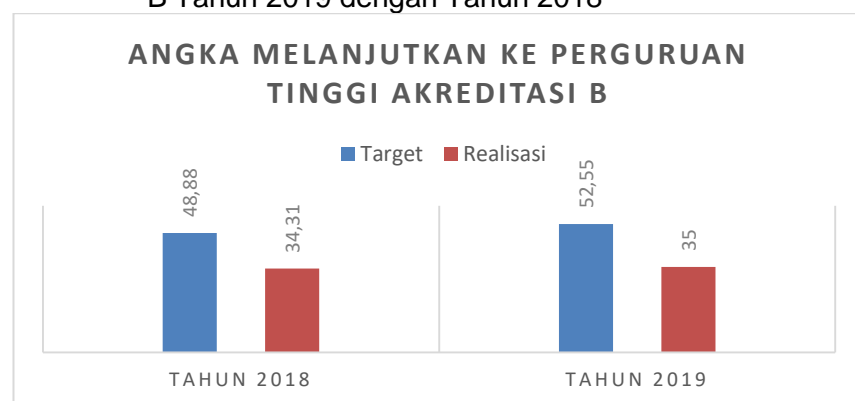
Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah antara lain masih banyak orang tua yang menganggap bahwa mempunyai ABK adalah sebuah aib atau hal yang memalukan bagi keluarga yang seharusnya memberikan pendidikan (intervensi) yang bisa membuat ABK hidup mandiri dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat namun orang tua lebih senang mengucilkan mereka dari dunia luar.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan diatas diantaranya Pemerintah Provinsi Jambi sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mewujudkan apa yang telah dituliskan dalam undang-undang diantaranya meningkatkan

ketersediaan sarana dan prasarana publik yang sesuai bagi ABK sehingga anak berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan baik dimasyarakat. Selain sarana dan prasaran pendidikan melalui kegiatan pembangunan dan penyediaan saran dan prasarana yang telah dijelaskan diatas, untuk jangka panjang Dinas Pendidikan Provinsi Jambi secara serius memberikan pembekalan bagi seluruh guru di Provinsi Jambi agar mempunyai kompetensi untuk menangani ABK. Dengan upaya tersebut, diharapkan jumlah anak berkebutuhan khusus di Provinsi Jambi semakin bertambah signifikan dari tahun ke tahun.

c. Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"

Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Angka Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Akreditasi B Tahun 2019 dengan Tahun 2018



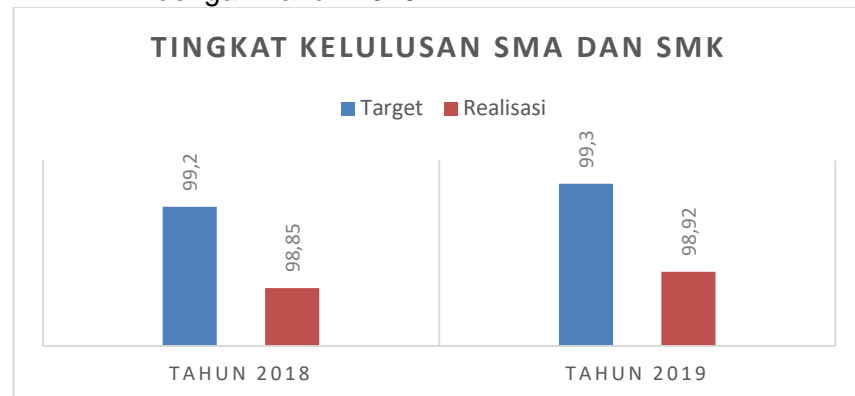
Jika dilihat dari grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Angka Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Akreditasi B Tahun 2019 dengan tahun 2018, indikator Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun jika dilihat tabel. 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019 masih jauh dari target yang diharapkan, hal ini tentunya adanya hambatan dalam capaian indikator tersebut dan perlunya solusi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Adapun hambatan tersebut adalah masih kurangnya Guru PNS pada tingkat SMA dan SMK Negeri yang disebabkan banyaknya guru PNS tersebut yang pensiun sehingga solusinya dilakukan pemetaan keberadaan Guru-guru dan selanjutnya

dilakukan penyebaran Guru baik PNS maupun non PNS dengan kategori yang sudah bersertifikasi dan belum bersertifikasi sehingga menunjang usaha peningkatan kompetensi Guru di tingkat SMAN dan SMKN di Provinsi Jambi.

d. Tingkat Kelulusan SMA dan SMK

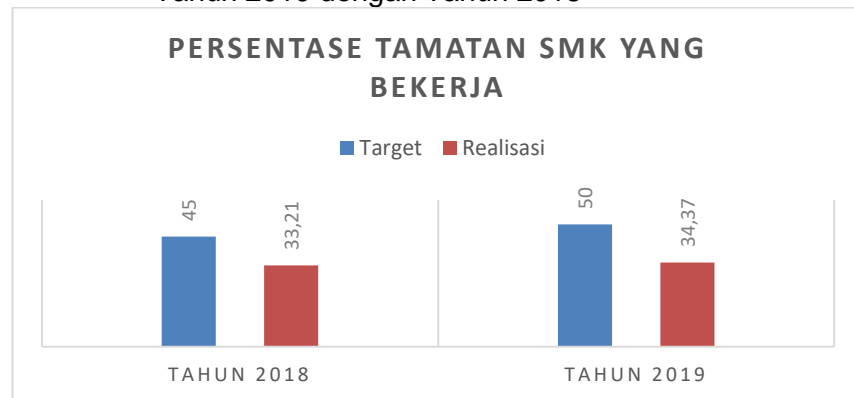
Grafik 3.7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK Tahun 2019 dengan Tahun 2018



Jika dilihat dari grafik 3.7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK Tahun 2019 dengan tahun 2018, indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya begitu juga jika dilihat tabel. 3.2 perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 hampir mendekati target yang diharapkan. Walaupun telah mendekati target, tentunya masih ada hambatan kedepan yang harus di hadapi yaitu masih adanya SMA dan SMK yang belum sepenuhnya melaksanakan kurikulum 2013 atau K13. Sehingga setiap tahun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terus memberikan pelatihan kepada SMA dan SMK berupa workshop Penyusunan Dokumen I Kurikulum SMA setiap tahunnya.

e. Persentase Tamatan SMK yang Bekerja

Grafik 3.8 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase Tamatan SMK yang Bekerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018



Jika dilihat dari tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase Tamatan SMK yang Bekerja tahun 2019 dengan tahun 2018, indikator Persentase Tamatan SMK yang Bekerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun jika dilihat tabel. 3.2 perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 belum mendekati target yang diharapkan.

Hambatan yang dihadapi pada saat ini tentunya lapangan pekerjaan yang belum bisa menyerap tenaga kerja lulusan SMK sepenuhnya, hal itu tidak terlepas dari kurikulum yang diberikan sehingga terjadi ketidaksesuaian program pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Seperti jurusan yang ada saat ini diantaranya akuntansi, manajemen, administrasi perkantoran yang bisa diisi oleh lulusan lain sehingga yang dibutuhkan oleh dunia industri pada saat ini diantaranya seperti tenaga IT (Teknologi Informasi).

Berdasarkan permasalahan tersebut tentu perlunya solusi yang tepat yang harus dilakukan, dimulai dengan membuat roadmap (peta jalan) untuk revitalisasi SMK di Provinsi Jambi. Untuk mewujudkan revitalisasi SMK tersebut diperlukan kerjasama semua stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, organisasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi dan uji kompetensi siswa, serta masyarakat sehingga tujuannya agar sekolah menengah

kejuruan dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang siap kerja di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.1.5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel. 3.4 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,86	94,85	-
		Nilai AKIP	87,38	87,38	17,45

Dari dua sasaran strategis, terdapat satu sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut : Berdasarkan tabel 3.4 diatas, kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja” Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 17%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut diperoleh melalui perbaikan laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi salah satunya laporan kinerja dan keuangan dana BOS dengan Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Dana Bos Jenjang SMAN, SMKN dan SLBN Se Provinsi Jambi Tahun 2019.

3.1.6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMA dan SMK

Pemerataan akses pendidikan merupakan upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk menunjang capaian indikator APK dan APM pada SMA dan SMK melalui pelaksanaan Program Pendidikan Menengah di Provinsi Jambi,

yang sudah menjadi kewenangan dan urusan Pemerintah Provinsi.

Pada tahun 2019, anggaran pelaksanaan perluasan akses pendidikan menengah selain bersumber dari dana APBD juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Program Pendidikan Menengah pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA dan SMK, yaitu :

1. Pembangunan 24 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan 3 RKB SMK yang bersumber dari DAK sedangkan dana bersumber dari APBD Provinsi Jambi sebanyak 6 RKB SMA dan 5 RKB SMK
2. Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 33 ruang SMA yang bersumber dari DAK sedangkan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi sebanyak 16 ruang SMA dan 3 ruang SMK
3. Pengadaan Meubiler SMA sebanyak 34 ruang kelas dan Meubiler SMK 57 ruang yang bersumber dari APBD Provinsi.
4. Pembangunan 17 Ruang Praktek Sekolah (RPS) SMK dan 31 paket pengadaan peralatan praktik SMK yang bersumber dari DAK sedangkan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi sebanyak 1 paket peralatan praktik SMK.

b. Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah

Anak berkebutuhan khusus merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, emosional, intelektual dan sosial. Setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu di bangku pendidikan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus yaitu di Sekolah Luar Biasa (SLB) melalui Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). Agar dapat berjalan dengan lancar dan optimal Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tahun 2019, sama hal nya dengan program pendidikan menengah juga melaksanakan pemerataan akses

pendidikan pada Pendidikan Luar Biasa agar proses pembelajaran di Sekolah Luar Biasa dapat berjalan lancar dan optimal sehingga jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah menjadi meningkat.

Anggaran perluasan akses pada Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) juga bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana APBD melalui Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) pada kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras PKLK yaitu :

1. Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 7 ruang,
2. Pengadaan meubiler siswa sebanyak 11 paket
3. Pengadaan peralatan pendidikan sebanyak 13 paket

Selain pembangunan dan pengadaan barang diatas, dalam mendukung pelayanan kepada siswa SLB berasrama ada pemberian makan dan minum kepada SLB berasrama se provinsi Jambi.

c. Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Akreditasi B tentunya melalui peningkatan mutu pendidikan yang dimulai dengan ketersediaan sarana prasarana di sekolah, peningkatan kompetensi Guru dan peningkatan daya saing siswa. Selain upaya perluasan akses pendidikan menengah yang telah diurai diatas maka sangat penting dilakukan peningkatan kompetensi Guru dan peningkatan daya saing siswa oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Pada tahun 2019 Dinas Pendidikan telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan diantaranya adalah meningkatnya kompetensi Guru SMA dan SMK melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK berupa Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMA dan SMK.

Selain berupa pelatihan yang diberikan, ada wadah yang disebut Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau disebut Kegiatan Pembinaan MGMP yang merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran serta pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru.

d. Tingkat Kelulusan SMA dan SMK

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam mempersiapkan kelulusan siswa dan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi tentunya melalui peningkatan mutu pendidikan diantaranya ketersediaan sarana prasarana di sekolah, peningkatan kompetensi Guru dan peningkatan daya saing selain itu ada komponen lain yang tidak kalah penting yaitu Kurikulum, melalui Kegiatan Pengembangan/Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMA diantaranya :

1. Pelatihan Pemantapan Peningkatan Mata Pelajaran yang di UN kan
2. Diklat Penyusunan Dokumen I Kurikulum SMA Tahun Pelajaran 2019/2020
3. Diklat Peningkatan dan Desain Pembelajaran Kurikulum 2013 peserta.

Jika dilihat dari tabel 3.3 perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018, indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya begitu juga jika dilihat tabel. 3.2 perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 hampir mendekati target yang diharapkan.

e. Persentase Tamatan SMK yang Bekerja

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk menunjang tamatan SMK untuk bekerja adalah melalui Program Pendidikan SMK dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMK berupa pembinaan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK yaitu :

1. Pelatihan Bidang Program Keahlian Perhotelan
2. Pelatihan Bidang Program Job Matching
3. Pelatihan Bidang Program Keahlian Produktif

Selain itu ada kegiatan inovasi dan kewirausahaan dalam hal peningkatan mutu pembelajaran siswa melalui kewirausahaan dan Inovasi dan juga expo bursa kerja.

1.2 Realisasi Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi dalam pencapaian sasaran organisasi. Jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.186.998.286.844,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 648.084.780.936,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 538.913.505.908,00, berikut ini tabel pengalokasian anggaran belanja langsung dan realisasi tahun 2019 pada 11 program Dinas Pendidikan Provinsi Jambi :

Tabel 3.5 Pengalokasian anggaran belanja langsung dan realisasi tahun 2019

NO		SKPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN Rp.
			APBD MURNI	PERUBAHAN	JUMLAH TOTAL	REALISASI KEUANGAN		FISIK(%)	
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	REAL	
Dinas Pendidikan									
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.607.975.400,00	435.000.000,00	6.042.975.400,00	5.407.128.534,00	89,48	97,96	635.846.866,00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		123.000.000,00	0,00	123.000.000,00	113.400.000,00	92,20	100,00	9.600.000,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.369.800.000,00	0,00	1.369.800.000,00	954.861.309,00	69,71	94,09	414.938.691,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		639.200.000,00	0,00	639.200.000,00	538.343.532,00	84,22	100,00	100.856.468,00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		402.600.000,00	30.000.000,00	432.600.000,00	363.700.000,00	84,07	90,18	68.900.000,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		200.000.000,00	75.000.000,00	275.000.000,00	274.324.000,00	99,75	100,00	676.000,00
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		673.275.400,00	0,00	673.275.400,00	673.275.400,00	100,00	100,00	0,00
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		737.220.000,00	0,00	737.220.000,00	737.219.000,00	100,00	100,00	1.000,00
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		156.880.000,00	30.000.000,00	186.880.000,00	182.830.000,00	97,83	100,00	4.050.000,00
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	36.120.000,00	75,25	100,00	11.880.000,00
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman		408.000.000,00	0,00	408.000.000,00	390.878.252,00	95,80	100,00	17.121.748,00
11	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		850.000.000,00	300.000.000,00	1.150.000.000,00	1.142.177.041,00	99,32	100,00	7.822.959,00
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur			1.580.538.973,00	2.316.400.000,00	3.896.938.973,00	3.127.571.568,00	80,26	80,36	769.367.405,00
1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	100,00	0,00
2	Kegiatan Pengadaan Pperlengkapan Gedung Kantor		148.250.000,00	262.900.000,00	411.150.000,00	405.821.400,00	98,70	98,72	5.328.600,00
3	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		263.375.000,00	771.500.000,00	1.034.875.000,00	578.833.700,00	55,93	56,18	456.041.300,00
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		175.413.973,00	0,00	175.413.973,00	175.410.000,00	100,00	100,00	3.973,00
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		466.000.000,00	200.000.000,00	666.000.000,00	665.569.500,00	99,94	100,00	430.500,00
6	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		527.500.000,00	382.000.000,00	909.500.000,00	601.936.968,00	66,18	66,30	307.563.032,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur			195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00	100,00	0,00
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas		195.000.000,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00	100,00	0,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	209.750.000,00	99,88	100,00	250.000,00
1	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	209.750.000,00	99,88	100,00	250.000,00

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur		419.300.000,00	150.000.000,00	569.300.000,00	509.344.000,00	89,47	99,39	59.956.000,00
1	Kegiatan Pengolahan Data dan Aset Pendidikan	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00	150.814.000,00	94,85	98,43	8.186.000,00
2	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	260.300.000,00	150.000.000,00	410.300.000,00	358.530.000,00	87,38	99,76	51.770.000,00
6. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)		15.473.344.950,00	1.006.550.000,00	16.479.894.950,00	15.458.894.209,00	93,80	96,97	1.021.000.741,00
1	Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan PKLK	2.530.485.750,00	0,00	2.530.485.750,00	2.083.873.747,00	82,35	91,18	446.612.003,00
2	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan PKLK	1.548.364.000,00	0,00	1.548.364.000,00	1.374.728.200,00	88,79	96,59	173.635.800,00
3	Penyelenggaraan PLA	1.085.000.000,00	0,00	1.085.000.000,00	1.051.355.492,00	96,90	99,56	33.644.508,00
4	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK	6.887.326.200,00	1.006.550.000,00	7.893.876.200,00	7.773.213.670,00	98,47	98,73	120.662.530,00
5	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendidikan PKLK	1.728.209.000,00	0,00	1.728.209.000,00	1.614.209.000,00	93,40	93,40	114.000.000,00
6	Peningkatan Kualitas Peserta Didik PKLK	1.627.960.000,00	0,00	1.627.960.000,00	1.499.599.100,00	92,12	100,00	128.360.900,00
7	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan PKLK	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	61.915.000,00	93,81	93,94	4.085.000,00
7. Program MUTENDIK		46.347.696.729,00	22.477.205.050,00	68.824.901.779,00	63.013.800.546,00	91,56	98,74	5.811.101.233,00
1	Peningkatan Kualitas PTK SMA	5.250.332.300,00	896.600.000,00	6.146.932.300,00	4.715.476.282,00	76,71	97,89	1.431.456.018,00
2	Peningkatan Kualitas PTK SMK	4.875.007.250,00	3.480.605.050,00	8.355.612.300,00	5.365.878.069,00	64,22	92,58	2.989.734.231,00
3	Peningkatan Kualitas PTK PKLK	1.495.289.000,00	0,00	1.495.289.000,00	1.062.703.495,00	71,07	96,74	432.585.505,00
4	Monitoring dan Evaluasi	350.000.000,00	100.000.000,00	450.000.000,00	273.406.000,00	60,76	95,78	176.594.000,00
5	Pembayaran PTT PTK Non PNS	34.377.068.179,00	18.000.000.000,00	52.377.068.179,00	51.596.336.700,00	98,51	99,90	780.731.479,00
8. Program Pendidikan SMA		66.377.816.610,00	2.989.203.051,00	69.367.019.661,00	64.588.306.101,00	93,11	98,68	4.778.713.560,00
1	Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMA	5.039.283.000,00	309.215.000,00	5.348.498.000,00	4.535.922.463,00	84,81	95,99	812.575.537,00
2	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMA	1.430.236.000,00	0,00	1.430.236.000,00	1.085.144.000,00	75,87	92,53	345.092.000,00
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	11.717.100.000,00	2.193.285.000,00	13.910.385.000,00	11.839.792.557,00	85,11	100,00	2.070.592.443,00
4	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA	31.011.272.184,00	486.703.051,00	31.497.975.235,00	30.395.664.166,00	96,50	98,14	1.102.311.069,00
5	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA	9.829.925.426,00	0,00	9.829.925.426,00	9.689.787.626,00	98,57	100,00	140.137.800,00
6	Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMA	7.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	6.696.999.189,00	95,67	99,93	303.000.811,00
7	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan SMA	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	344.996.100,00	98,57	98,57	5.003.900,00
9. Program Pendidikan SMK		86.181.595.844,00	1.578.225.000,00	87.759.820.844,00	80.203.820.035,00	91,39	97,82	7.556.000.809,00
1	Pengembangan / Penyusunan Kurikulum Pendidikan SMK	2.133.630.000,00	0,00	2.133.630.000,00	1.639.589.000,00	76,85	95,31	494.041.000,00
2	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan SMK	2.564.652.500,00	100.000.000,00	2.664.652.500,00	2.125.905.200,00	79,78	94,68	538.747.300,00
3	Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	5.477.667.000,00	800.000.000,00	6.277.667.000,00	5.461.052.095,00	86,99	99,90	816.614.905,00
4	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK	69.088.096.700,00	477.000.000,00	69.565.096.700,00	65.615.896.390,00	94,32	98,07	3.949.200.310,00
5	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK	601.349.644,00	-120.000.000,00	481.349.644,00	328.634.000,00	68,27	68,75	152.715.644,00

6	Peningkatan Kualitas Peserta Didik SMK	5.966.200.000,00	321.225.000,00	6.287.425.000,00	4.687.383.350,00	74,55	97,30	1.600.041.650,00
7	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan SMK	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	345.360.000,00	98,67	99,29	4.640.000,00
10. Manajemen Pelayanan Pendidikan		9.089.125.494,00	440.816.899,00	9.529.942.393,00	8.426.881.423,00	88,43	95,68	1.103.060.970,00
1	Sosialisasi dan Advokasi di Bidang Pendidikan	327.500.000,00	0,00	327.500.000,00	287.988.746,00	87,94	95,45	39.511.254,00
2	Monitoring dan Evaluasi	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	293.949.220,00	97,98	100,00	6.050.780,00
3	Koordinasi dan Perencanaan Bidang Pendidikan Kab./Kota	847.510.000,00	0,00	847.510.000,00	728.409.727,00	85,95	97,44	119.100.273,00
4	Kepramukaan	346.500.000,00	0,00	346.500.000,00	254.184.160,00	73,36	93,43	92.315.840,00
5	Penyelenggaraan UKS	697.110.000,00	0,00	697.110.000,00	657.400.734,00	94,30	99,60	39.709.266,00
6	Pengarus Utama Gender	156.855.500,00	0,00	156.855.500,00	141.943.900,00	90,49	92,35	14.911.600,00
7	Peningkatan Karya Tulis Ilmiah Siswa Jenjang Pendidikan	446.645.000,00	0,00	446.645.000,00	403.685.000,00	90,38	99,33	42.960.000,00
8	Pengelolaan Jejaring WEB BTIKP	1.582.300.000,00	169.046.899,00	1.751.346.899,00	1.727.780.760,00	98,65	99,90	23.566.139,00
9	Pelatihan Kompetensi TIK Pendidikan	1.144.700.000,00	186.220.000,00	1.330.920.000,00	1.259.892.000,00	94,66	100,00	71.028.000,00
10	Pengelolaan Teknologi Pembelajaran	715.650.000,00	0,00	715.650.000,00	664.470.000,00	92,85	99,11	51.180.000,00
11	PPDB Online	495.000.000,00	0,00	495.000.000,00	362.455.760,00	73,22	82,12	132.544.240,00
12	Kegiatan Penatausahaan Administrasi BTIKP	472.350.000,00	85.550.000,00	557.900.000,00	556.234.120,00	99,70	100,00	1.665.880,00
13	Olimpiade Siswa dan PTK Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	1.308.088.494,00	0,00	1.308.088.494,00	863.664.296,00	66,02	83,54	444.424.198,00
14	Pendidikan Keluarga	248.916.500,00	0,00	248.916.500,00	224.823.000,00	90,32	90,98	24.093.500,00
11. Program BOS		270.962.148.000,00	5.075.563.908,00	276.037.711.908,00	202.570.140.700,00	73,38	100,00	73.467.571.208,00
1	Kegiatan BOS APBN	255.962.148.000,00	4.468.963.908,00	260.431.111.908,00	187.468.268.000,00	71,98	100,00	72.962.843.908,00
2	BEASISWA	15.000.000.000,00	-40.000.000,00	14.960.000.000,00	14.464.767.500,00	96,69	100,00	495.232.500,00
3	BOS APBD	0,00	646.600.000,00	646.600.000,00	637.105.200,00	98,53	100,00	9.494.800,00
JUMLAH		502.444.542.000,00	36.468.963.908,00	538.913.505.908,00	443.710.637.116,00	82,33	98,98	95.202.868.792,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2019. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) di dunia pendidikan. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2019 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari sebelas program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019. Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian IKU selama tahun 2019.

Tabel. 4.1 Rekapitulasi pencapaian IKU selama 2019

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Indikator
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	4
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	1
3.	$66 \leq 75$	Sedang	3
4.	$51 \leq 65$	Rendah	1
5.	≤ 50	Sangat Rendah	1

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 indikator masuk kategori sangat baik, 1 indikator masuk kategori tinggi, 3 indikator masuk kategori sedang, 1 Indikator masuk kategori rendah dan 1 indikator masuk dalam kategori sangat rendah. Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun 2019 atau tahun ketiga dari pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021, LKjIP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2019 merupakan dasar berpijak bagi Dinas Pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pendidikan untuk dua tahun berikutnya sesuai perubahan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan antara lain adalah masih ada budaya melakukan nikah di usia dini pada masyarakat, Masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang dipengaruhi oleh anak yang masih berusia

sekolah yang harus bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga, masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, masih banyak orang tua yang menganggap bahwa mempunyai ABK adalah sebuah aib atau hal yang memalukan bagi keluarga yang seharusnya memberikan pendidikan (intervensi) yang bisa membuat ABK hidup mandiri dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat namun orang tua lebih senang mengucilkan mereka dari dunia luar, masih kurangnya Guru PNS pada tingkat SMA dan SMK Negeri, lapangan pekerjaan yang belum bisa menyerap tenaga kerja lulusan SMK sepenuhnya.

Dinas Pendidikan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang.

Sebagai perbaikan kinerja SKPD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. AGUS HERIANTO, SH**

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. H. FACHRORI UMAR M.HUM**

Jabatan : Plt. GUBERNUR JAMBI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Plt. GUBERNUR JAMBI,
DTO

DR. H. FACHRORI UMAR, M.HUM

Jambi, Januari 2019
Pihak Pertama,

KEPALA DINAS,
DTO

H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690818 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi
Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APK	(SMA) 57,85%
			(SMK) 31,74%
		APM	(SMA) 48,54%
			(SMK) 27,13%
		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah	22%
		Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"	52,55%
		Tingkat Kelulusan SMA/SMK	99,3%
		Persentase Tamatan SMK yang Bekerja	50%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 (B)
		Nilai AKIP	62 (B)

Program :

Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	Rp. 5.607.975.400,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.580.538.973,00
Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 195.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 210.000.000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	
Capaian Kinerja Aparatur	Rp. 419.300.000,00
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Rp. 15.473.344.950,00

Anggaran :

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 46.347.696.729,00
Pendidikan SMA	Rp. 66.377.816.610,00
Pendidikan SMK	Rp. 86.181.595.844,00
Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 9.089.125.494,00
Bos	Rp. 270.962.148.000,00

Jambi, Januari 2019

Plt. GUBERNUR JAMBI,

KEPALA DINAS,

dto

dto

DR. H. FACHRORI UMAR, M.HUM

H. AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690818 199703 1 004